

ABSTRAK

Rumusan masalah peneilitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum penyidikan perkara anak yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, pelaksanaan penyidikan terhadap perkara anak yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah Polres Kudus, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap perkara anak yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah Polres Kudus.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, observasi langsung dan pencatatan dokumen.

Hasil penelitian adalah dasar hukum penyidikan perkara pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana ketentuan pemidanaan tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar diatur dalam Pasal 197, hal tersebut merujuk dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) yang berupa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap perkara anak yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah Polres Kudus telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, hal tersebut dibuktikan dengan telah dilaksanakannya prosedur-prosedur tindakan Penyidik dalam proses penyidikannya. Proses penyidikannya juga berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polres Kudus dalam melaksanakan penyidikan terhadap perkara anak yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah hukum Polres Kudus adalah keterbatasan baik kuantitas maupun kualitas SDM aparat penegak hukum yang memahami perkara anak, terbatasnya biaya operasional, rendahnya kesadaran saksi dalam menghadiri proses pemeriksaan, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan waktu yang ditentukan dalam penyidikan perkara anak sangat sedikit, sedangkan pemberkasan harus diserahkan secepatnya.

Kata Kunci : Penyidikan, Anak, Farmasi Tidak Memiliki Izin Edar

ABSTRACT

The formulation of this research problem is to find out the legal basis for investigating child cases that circulate pharmaceutical preparations that do not have marketing permits, carry out investigations on child cases that distribute pharmaceutical preparations that do not have distribution permits in the area of Holy Police, barriers and solutions in conducting investigations into child cases which distributes pharmaceutical preparations that do not have distribution permits in the area of the Holy Police.

The research method used in this study is an empirical juridical method. The research specifications used by the writer are descriptive analysis. The technique of data collection is done by in-depth interviews with parties involved in research, direct observation and recording of documents.

The results of the study are basic. The legal basis for investigating cases of circulation and misuse of pharmaceutical preparations without marketing authorization is Law No. 36 of 2009 concerning Health, which stipulates that the criminal offenses for the distribution and misuse of pharmaceutical preparations are regulated in Article 197, referring to the provisions of Article 106 paragraph (1) in the form of pharmaceutical preparations and medical devices can only be circulated after obtaining distribution permits. The implementation of the investigation process on child cases that circulate pharmaceutical preparations that do not have distribution permits in the area of the Holy Police has been carried out based on the procedural law in Indonesia, namely the Criminal Procedure Code, as evidenced by the procedures of Investigators' actions in the investigation process. The investigation process is also based on the provisions in Article 189 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts and the provisions of Article 82 of Act Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The obstacles faced by the Investigator of the Holy Police in carrying out investigations on child cases that circulate pharmaceutical preparations that do not have distribution permits in the jurisdiction of the Holy Police are the limitations of both the quantity and quality of human rights law enforcement officers who understand children's cases, limited operational costs, low witness awareness in attend the examination process, lack of legal awareness from the community and the time specified in the investigation of child cases is very little, while filing must be submitted as soon as possible.

Keywords: Investigation, Child, Pharmacy Does Not Have Circular License

